

ANALISIS PERBANDINGAN KEMITRAAN *NATIONAL PLASTIC ACTION PARTNERSHIP* (NPAP) INDONESIA DAN VIETNAM DALAM UPAYA MENGURANGI SAMPAH PLASTIK

***Handrian¹ & Alfajri²**

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Email Korespondensi: handrian9996@gmail.com

Abstract

Plastic waste has become a pressing global environmental issue that requires cross-sectoral and international collaboration. This study analyzes the comparative partnership of the National Plastic Action Partnership (NPAP) in Indonesia and Vietnam within the context of plastic waste reduction. Using a qualitative descriptive approach and the concept of Multi-Stakeholder Partnership (MSP), this research highlights the roles of various actors, including government, private sector, non-governmental organizations, and financial institutions in implementing NPAP programme in Indonesia and Vietnam. The findings indicate that while both countries show strong commitment to tackling plastic pollution, their approaches differ in character. Indonesia emphasizes building inclusive partnerships through inter-actor coordination, whereas Vietnam focuses on achieving national targets through policy innovation and recycling technology. Governance, financing, public awareness, and technological capacity remain shared challenges that influence the effectiveness of NPAP implementation in both countries. This study underscores the importance of stakeholder synergy in achieving sustainable plastic waste management.

Keywords: plastic waste, NPAP, multi-stakeholder partnership, Indonesia, Vietnam, circular economy

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah plastik telah menjadi hal yang serius di tingkat global, termasuk di negara-negara Asia Tenggara. Penelitian ini mengkaji perbandingan upaya yang dilakukan oleh kemitraan *National Plastic Action Partnership* (NPAP) di negara Indonesia dan Vietnam dalam mencegah dan mengurangi sampah plastik. Masalah sampah merupakan bagian dari isu lingkungan yang merupakan kajian *low politics* dalam studi hubungan internasional (Zahran & Alfajri, 2023).

Plastik merupakan suatu benda yang sulit di uraikan oleh mikroorganisme karena terdiri dari bahan kimia yang kompleks dan stabil (Fithriyah, 2023). Kebanyakan masyarakat yang mencoba melakukan pembakaran sampah plastik yang sudah tidak memungkinkan untuk di daur ulang, akan tetapi tindakan ini berdampak buruk pada lingkungan karena dapat menimbulkan gas yang mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia di sekitarnya, juga dapat merusak atmosfer bumi secara perlahan. Masyarakat di kawasan perkampungan pada umumnya membakar sampah karena kurangnya pengetahuan mengenai sistem daur ulang. Selain itu, wilayah tersebut tidak terjangkau oleh petugas kebersihan yang secara rutin mengumpulkan sampah plastik maupun organik untuk proses daur ulang jadi alternatifnya memilih cara yang lebih sederhana yaitu membakar sampah (Karuniastuti, 2013). Namun, pembakaran sampah plastik bukanlah satu-satunya perilaku yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, karena pencemaran juga terjadi akibat pembuangan sampah plastik ke laut dan sungai.

Berdasarkan data menurut *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD), diperkirakan akan terjadi peningkatan sampah plastik dari total 460 juta ton pada tahun 2019 menjadi meningkat pada tahun 2060 mencapai angka 1.231 juta ton, atau terjadi peningkatan sebesar tiga kali lipat (OECD, 2022). Sampah-sampah plastik berukuran besar, sebagiannya ditemukan sebagian masuk ke laut, terdampar, terkubur, dan muncul kembali di sepanjang garis pantai. Sampah-sampah tersebut rata-rata berusia kurang dari 5 tahun akan tetapi, sebagian besar ada yang berumur sekitar 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sampah plastik dapat bertahan dan terurai dalam kurun waktu yang sangat lama. Meskipun sampah plastik terlihat banyak yang mengambang di berbagai pesisir pantai, akan tetapi ini hanya sebagian kecil dari plastik yang masuk ke lautan (OECD, 2022).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Juli 2024. Berdasarkan riset dari 290 total kabupaten di Indonesia menyebutkan bahwa jumlah timbunan sampah organik maupun anorganik pada tahun 2024 telah mencapai pengkatan dari tahun sebelumnya dengan total angka 31,9 juta ton. Dari total produksi sampah di Indonesia sayangnya hanya sekitar 20,5 juta ton yang hanya dapat terkelola, sedangkan sisanya di angka 11,3 juta ton sampah tidak berhasil terkelola (BRIN, 2024). Oleh karena itu banyak terlihat sampah yang berserakan di negara Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2022, sampah yang berserakan hingga sampah yang tertimbun di negara Indonesia tercatat di kisaran angka 21 juta ton. Berdasarkan data produksinya, sampah yang dapat di kelola hanya berkisar di angka 13.9 juta ton, sementara itu sampah yang tidak terkelola oleh negara Indonesia masih sangat banyak dengan kisaran angka 7,2 juta ton (Kemenko PMK, 2023). Indonesia juga banyak mengimpor sampah dari luar negeri, juga mencetak rekor dengan negara pengimpor sampah plastik terbanyak di dunia di peringkat ke-7, jumlah kalkulasi sampah plastik yang di impor oleh Indonesia dari Sebagian negara terhitung sekitar 233.000 Ton sampah sepanjang tahun 2020. Tidak hanya mengimpor sampah plastik, Indonesia juga banyak mengimpor sampah berjenis lain (Utomo, 2023).

Salah satu komitmen Indonesia dalam upaya mengurangi sampah plastik adalah “Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut menetapkan tujuan untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2025”. Pemerintah juga mendukung kampanye pengelolaan sampah berkelanjutan dan melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di beberapa kota, seperti Jakarta dan Bali (Putrantomo et al., n.d.).

Sementara itu, Vietnam menghasilkan sekitar 3,7 juta ton sampah plastik per tahun, dan hanya 10 hingga 15% dari jumlah ini yang didaur ulang. Sampah di Vietnam meningkat sebesar 46% dari tahun 2010 hingga 2019. Sebagian besar sisa kemasan barang kebutuhan primer maupun sekunder dibuang di tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir atau dibakar tanpa perlu mendaur ulang. Sebagai bagian dari peralihan negara ke ekonomi sirkular, perubahan hukum negara Vietnam baru-baru ini bertujuan untuk memperluas tanggung jawab dari produsen dan importir melalui daur ulang sampah. Penggunaan bahan plastik meningkat seiring dengan meningkatnya urbanisasi dan kelas menengah. Masyarakat Vietnam rata-rata menggunakan 41,3 kg plastik per tahun, atau 7.600 kantong belanjaan plastik. Pemerintah Vietnam melakukan upaya besar untuk mengatasi masalah sampah dan menetapkan rencana dan target daur ulang yang ambisius (Waste Aid, 2025).

Vietnam termasuk dalam kategori sepuluh negara teratas di dunia dalam krisis sampah plastik. Konsumsi plastik sekali pakai sudah menjadi permasalahan yang umum di negara Vietnam. Kurang lebih di angka 75% sampah di negara Vietnam khususnya sampah plastik tidak terlalu diperhatikan dan banyak masyarakat yang masih menganggap sepele dalam hal ini, dibuktikan hanya kurang lebih

sekitar 30% total sampah di negara Vietnam yang berhasil dikelola (Okumah, 2024). Sebagian besar plastik yang mencemari perairan di Vietnam adalah barang sekali pakai dan bernilai rendah, seperti sedotan, kemasan makanan, dan kantong plastik. Menurut Kemitraan Aksi Plastik Nasional Vietnam (NPAP), jika sistem pengumpulan, daur ulang, dan pengolahan sampah di negara ini tidak diperbaiki, jumlah plastik di perairan dapat meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2030 (DKSH Group, 2023).

Vietnam juga telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengurangi sampah plastik melalui berbagai kebijakan dan inisiatif seperti penerapan ekonomi sirkular yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keuangan. Selain itu Pemerintah Vietnam juga mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut Tahun 2030 (Keputusan No. 1746/QĐ-TTg tanggal 4 Desember 2019). Rencana aksi nasional tersebut menetapkan tidak ada lagi plastik sekali pakai atau kantong plastik sekali pakai di 80% di kawasan perairan Vietnam pada tahun 2025, dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2030 (Institute for Global Environmental Strategies, 2024).

Selain itu, Vietnam berencana untuk mengurangi sampah plastik sebesar 50% di laut dan sepenuhnya di kawasan wisata (Company, 2021). Pada Mei 2023, Vietnam meluncurkan Vietnam National Plastic Action Partnership (NPAP) untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Tujuan NPAP adalah untuk mendorong inovasi dan investasi dalam metode yang efisien untuk mengurangi polusi dan sampah plastik di Vietnam. Vietnam NPAP dibentuk melibatkan berbagai pihak, seperti kementerian terkait perusahaan domestik dan internasional, serta organisasi non-pemerintah, untuk mendorong konsep dan solusi baru untuk mengurangi penggunaan kembali dan daur ulang sampah plastik (UNDP, 2023).

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penelitian lain, yang digunakan sebagai referensi atau perbandingan dalam penelitian baru. Penelitian terdahulu dapat diartikan sebagai sumber informasi dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang digunakan untuk membandingkan dan menginspirasi penelitian baru.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh “Ayuni Salsabila Putri, Ema Isfa’atin Khasanah, Anita Rachmawati, Almira Aida Shakira” yang berjudul “*The Indonesia-Australia Collaboration to Tackle Plastic Waste Through the Indo-Pacific Plastic Innovation Network (Ippin) Program*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Indo-Pacific Plastic Innovation Network (IPPIN)* adalah jaringan kolaborasi regional yang membantu menciptakan ekonomi sirkular dan mendefinisikan kembali siklus plastik melalui penelitian, bisnis, dan investasi. Program IPPIN beroperasi di Thailand, Vietnam, Laos, dan Kamboja, serta di Indonesia (Putri et al., 2024).

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh “Hendar hendar, Teuku Rezasyah, Deasy Silvy Sari” yang berjudul “*Diplomasi Lingkungan Indonesia melalui ASEAN dalam Menanggulangi Marine Plastic Debris*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah plastik di laut adalah masalah internasional yang membutuhkan tindakan kolaboratif regional dan global. Indonesia berpartisipasi dalam setiap langkah diplomasi lingkungan ASEAN, mulai dari awal hingga pelaksanaan Rencana Aksi Regional ASEAN untuk menangani Sampah Laut di Negara Anggota ASEAN 2021–2025 (Hendar et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu tersebut berfokus pada topik yang berbeda seperti yang di tulis oleh “Ayuni Salsabila Putri, Ema Isfa’atin Khasanah, Anita Rachmawati, Almira Aida Shakira” pada tahun 2024 berfokus pada kolaborasi antara Indonesia dan Australia dalam menangani permasalahan sampah plastik melalui program *Indo-Pacific Plastic Innovation Network (IPPIN)*. Sementara itu,

penelitian oleh “Hendar hendar, Teuku Rezasyah, Deasy Silvy Sari” pada tahun 2022 berfokus menganalisis bagaimana Indonesia menjalankan diplomasi lingkungan dalam menghadapi permasalahan sampah plastik laut, khususnya melalui kerangka kerja ASEAN.

Sedangkan, dalam penelitian ini mengkaji perbandingan kemitraan *National Plastic Action Partnership* (NPAP) dalam upaya mengurangi sampah plastik di negara Indonesia dan Vietnam. Menggunakan konsep *Multi-Stakeholder Partnership* (MSP) dengan rentang tahun 2025 hingga 2030. Konsep ini memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu karena sama-sama melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi isu sampah plastik. Terutama karena masalah sampah plastik adalah isu kompleks yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Sampah plastik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau satu sektor tertentu, melainkan melibatkan banyak aktor dengan peran dan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan adanya keterkaitan kemitraan multi-pihak menjadi kerangka kerja yang ideal untuk menyatukan upaya dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, komunitas lokal, dan masyarakat umum.

Multi-StakeHolder Partnership (MSP) adalah mekanisme kerja sama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, organisasi swasta, organisasi internasional, media, lembaga non-pemerintah, lembaga penelitian, dan akademisi. MSP berbagi pengalaman, data, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang. Keterlibatan MSP seringkali ditemukan dalam permasalahan yang berdampak secara global yang tidak dapat diselesaikan melalui intervensi satu pihak. Oleh karena itu, banyak pihak berkontribusi pada MSP dengan menyumbangkan keterampilan dan sumber daya tambahan mereka dalam menyelesaikan suatu masalah. Pendefinisian kerangka kerja bersama dan menjamin bahwa semua pemangku kepentingan terlibat secara aktif dalam proses adalah karakteristik umum dari pengoperasian MSP. Dengan asumsi bahwa MSP meningkatkan efisiensi dalam implementasi langkah-langkah dalam proses pencarian solusi. Para pemangku kepentingan harus memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses dan keputusan yang dibuat, tidak peduli apakah mereka bertanggung jawab atas sumber daya yang signifikan atau tidak, atau apakah mereka termasuk dalam kelompok sosial tertentu (IWRM, 2025).

MSP juga disebut sebagai kelompok solidaritas, hibrida, dan sosial, mendorong orang dari berbagai kelompok untuk menjadi pemilik. Ini termasuk produsen, pelanggan, klien, karyawan, dan investor. Mereka memiliki kemampuan untuk memadukan aktivitas pasar dengan penyediaan layanan sosial dan partisipasi demokratis dalam satu langkah. Berbagai pemangku kepentingan mungkin tampak memiliki kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Namun, kerjasama ini melihat bisnis mereka dari sudut pandang sistem, mengingat bagaimana keputusan seperti praktik ketenagakerjaan, penetapan harga, dan lainnya memengaruhi semua kelompok pemangku kepentingan (USDN, 2016).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskripsi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan topik pembahasan bagaimana analisis perbandingan kemitraan *national plastic action partnership* (NPAP) Indonesia dan Vietnam dalam upaya mengurangi sampah plastik (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini mengumpulkan data dengan teknik studi kepustakaan yang mengutip data sekunder atau sumber data tidak langsung. Sumber data skunder meliputi laporan, jurnal, website,

buku, dokumen, materi pemaparan, dan bentuk lainnya. Data sekunder yang digunakan terkait dengan bagaimana upaya NPAP Indonesia dan Vietnam mengurangi sampah plastik meliputi kolaborasi multi-pemangku kepentingan (Bäckstrand, 2008).

PEMBAHASAN

Perbandingan Peran Aktor yang Terlibat

Aktor berperan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kekuasaan, maupun interaksi dengan sistem politik secara lebih luas. Ruang lingkup aktor politik tidak terbatas pada aktor domestik, seperti pemerintah, partai politik, atau kelompok kepentingan, tetapi juga mencakup aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, dan korporasi multinasional yang turut memengaruhi dinamika politik suatu negara. Ketika membandingkan aktor politik antara dua negara, analisis difokuskan pada karakteristik, sumber daya dan strategi yang dimiliki masing-masing aktor (Powell et al., 2017). Perbandingan aktor yang terlibat dalam implementasi kemitraan NPAP negara Indonesia dan Vietnam dalam upaya mengurangi sampah plastik dimulai dari aktor pemerintah, aktor swasta, aktor NGO, aktor lembaga keuangan hingga masyarakat sipil aktor (Powell et al., 2017). Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai macam aktor pada masing-masing negara yang terlibat:

Aktor Pemerintah

Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memiliki peran krusial dalam implementasi strategi pengelolaan sampah plastik di Indonesia melalui serangkaian kebijakan terstruktur, serta sinergi multipihak (KLHK, 2019). Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.75/2019. Kebijakan ini mengacu pada konsep *extended producer responsibility* (EPR), yang menuntut produsen tidak hanya bertanggung jawab atas produknya, tetapi juga atas pengelolaan limbah kemasan pasca-konsumsi. Dalam peta jalan yang dirancang untuk periode 2020–2029, ditetapkan target penurunan sampah kemasan sebesar 30% pada akhir 2029. Untuk mencapainya, produsen perlu menerapkan berbagai upaya, seperti mendesain kemasan yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan penggunaan bahan daur ulang, mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, serta membangun sistem pengelolaan limbah kemasan yang efektif (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2019).

Di tingkat provinsi, Peraturan Daerah (Perda) Larangan Kantong Plastik meliputi Bali dan Jakarta. Provinsi Bali menjadi salah satu pelopor dalam kebijakan ini dengan mengeluarkan Perda No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Aturan ini melarang penggunaan kantong plastik, *styrofoam*, dan sedotan plastik di toko modern, pasar tradisional, serta usaha kecil dan menengah (UMKM) (Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2019).

Di kabupaten/kota Pemerintah kabupaten/kota mengimplementasikan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti "Bank Sampah". Program tersebut bertujuan sebagai strategi untuk menekan volume sampah sekaligus mendorong partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Bank Sampah berfungsi dengan mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah rumah tangga, terutama sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam, dan kaca, yang kemudian disetor ke unit Bank Sampah setempat (Triana et al., 2019).

Di Vietnam yaitu Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (MONRE), memiliki peran sentral dalam mitigasi polusi plastik melalui serangkaian kebijakan strategis dan program inovatif yang dirancang untuk menanggulangi krisis lingkungan. berfokus pada tiga pilar utama yaitu: pembatasan produksi dan konsumsi plastik sekali pakai, optimalisasi sistem daur ulang, dan edukasi besar-besaran (UNDP, 2023). Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam

(MARD) memiliki peran strategis dalam menangani persoalan limbah plastik melalui serangkaian kebijakan dan inisiatif terpadu (Ministry of Agriculture and Rural Development, 2020).

Kebijakan nasional yang digagas oleh pemerintah Vietnam demi mengurangi krisis sampah plastik adalah *National Action Plan for Marine Plastic Waste Management (2020-2030)* Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut Tahun 2030 atau yang lebih dikenal sebagai *Vietnam's National Action Plan for Marine Plastic Waste Management (2020-2030)* adalah sebuah kebijakan nasional yang dirumuskan untuk menangani persoalan sampah plastik di laut dengan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan (Institute for Global Environmental Strategies, 2024).

Kebijakan tingkat provinsi yang diberlakukan di Vietnam mencakup aturan tegas terkait pemakaian barang plastik sekali pakai dalam rangka menekan jumlah limbah plastik. Dua metropolitan utama di Vietnam ini berupaya keras mengatasi isu lingkungan dengan membatasi peredaran dan pemakaian produk plastik tidak ramah lingkungan, misalnya kantong belanja, sedotan, serta kemasan makanan. Sejak 2021, pasar tradisional dan mall di Ho Chi Minh didorong menggunakan material yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, Hanoi menerapkan kebijakan serupa dengan memberikan denda kepada pelaku bisnis yang melanggar peraturan pembatasan plastik (World Bank Group, 2022).

Kebijakan tingkat kabupaten/kota Vietnam adalah peluncuran program "*Zero Waste City*" di kota Da Nang. Vietnam telah memperkenalkan inisiatif "Kota Bebas Sampah" untuk mendorong pelestarian lingkungan dan mengurangi produksi limbah. Tujuan utama program ini adalah menjadikan Da Nang sebagai kota yang berkelanjutan dengan menerapkan konsep ekonomi berkelanjutan, di mana limbah dikelola secara optimal melalui daur ulang, pengomposan, serta pembatasan pemakaian plastik sekali pakai (UNDP, 2023).

Aktor Swasta

Terdapat banyak aktor yang terlibat dalam upaya pengurangan sampah plastik di Indonesia, namun dalam penelitian ini hanya dibahas dua saja, yaitu Unilever dan Nestle Indonesia. Unilever Indonesia bertujuan mengurangi penggunaan plastik, meningkatkan sistem daur ulang, dan mendukung pengumpulan sampah plastik. Unilever Indonesia meluncurkan *Unilever Indonesia Community Refill Program* sebagai upaya untuk menekan limbah plastik dengan mengajak masyarakat memanfaatkan kembali kemasan produk yang mereka miliki. Melalui program ini, pelanggan dapat membeli produk-produk Unilever seperti deterjen, sabun, atau sampo dalam bentuk isi ulang dengan kemasan yang lebih *eco-friendly*, seperti sachet berbahan mudah terurai atau wadah besar yang bisa diisi kembali di lokasi-lokasi tertentu (Unilever, 2023).

Sementara itu, Nestle Indonesia, berkomitmen membuat 100% kemasan dapat didaur ulang atau digunakan kembali pada 2025. Nestlé mendukung inisiatif daur ulang melalui kolaborasi dengan *Rebricks*. Salah satu program dari PT Nestlé Indonesia ialah mendistribusikan 5.000 kursi hasil daur ulang plastik bekas pakai ke 500 SD di wilayah Indonesia. Pada fase pertama, sebanyak 720 bangku akan diberikan kepada 72 sekolah dasar di beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta, Pringsewu, Tanggamus, Bandar Lampung, Sukabumi, dan Karawang. Selain penyerahan bangku, program ini juga mencakup kegiatan edukasi bagi siswa mengenai praktik mengurangi dan memilah sampah di lingkungan sekolah (PT Nestle Indonesia, 2024).

Sedangkan di Vietnam juga terdapat banyak aktor swasta yang terlibat, tapi penelitian ini mengkaji dua perusahaan saja, diantaranya Coca Cola dan Unilever Vietnam. Coca Cola Vietnam berpartisipasi dalam inisiatif "*Zero Waste to Nature*" dengan memperkenalkan kemasan ramah lingkungan. Coca Cola Vietnam telah membuktikan dedikasinya terhadap pelestarian alam dengan

terlibat dalam program "Zero Waste to Nature", sebuah aksi yang fokus pada penanggulangan limbah plastik dan promosi pembangunan berkelanjutan. Salah satu tindakan konkret yang diambil oleh perusahaan adalah meluncurkan kemasan berwawasan lingkungan, seperti botol berbahan dasar tumbuhan, sebagai solusi untuk meminimalisir penggunaan plastik konvensional (Vietnam News, 2023).

Sementara itu, Unilever Vietnam berkomitmen mengurangi penggunaan plastik baru dan meningkatkan kandungan daur ulang dalam kemasannya. Unilever Vietnam telah mengimplementasikan berbagai program inovatif untuk menangani permasalahan limbah plastik, termasuk kolaborasi dengan pemerintah dan pelaku bisnis lokal dalam membentuk *Vietnam Recycling Platform*. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai nilai daur ulang serta mengembangkan sarana pengelolaan sampah plastik yang efektif (Vietnam News, 2021).

Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO)

Untuk kategori aktor NGO, di Indonesia dibahas upaya dua aktor yaitu *World Wide Fund for Nature* (WWF) dan Greenpeace. WWF Indonesia memainkan peran signifikan dalam upaya mitigasi limbah plastik di Indonesia melalui kolaborasi strategis dengan NPAP dalam bentuk pendekatan berbasis bukti ilmiah serta solusi berkelanjutan untuk menangani masalah polusi plastik. WWF Indonesia mengadopsi pendekatan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat guna mengatasi masalah pencemaran plastik. Inisiatif utama mereka adalah gerakan "*Plastic Smart Cities*" yang dirancang untuk menghalangi aliran plastik ke lingkungan alam, terutama ekosistem laut, melalui advokasi kebijakan, peningkatan pemahaman masyarakat, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular (Kinasih, 2024).

Sementara itu, Green Peace Indonesia telah berperan aktif dalam upaya mitigasi limbah plastik di Indonesia melalui advokasi kebijakan yang lebih restriktif serta edukasi publik mengenai dampak negatif plastik terhadap ekosistem (Green Peace, 2021). *Greenpeace* Indonesia secara aktif mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk menangani permasalahan sampah plastik di Indonesia melalui serangkaian kegiatan kampanye, program edukasi, serta advokasi kebijakan terhadap pemerintah dan pelaku industri. Fokus utama organisasi ini adalah gerakan "Bebas Plastik" yang mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai, termasuk kantong belanja, sedotan, dan kemasan makanan (Green Peace Indonesia, 2023).

Sedangkan di Vietnam, penelitian ini menyoroti keterlibatan dari dua NGO ternama di negara tersebut yaitu *World Wide Fund for Nature* dan *Green Hub* Vietnam. *World Wide Fund for Nature* (WWF) Vietnam telah memberikan kontribusi signifikan dalam penanganan limbah plastik di Vietnam melalui kemitraan strategis dengan NPAP dalam perumusan kebijakan dan strategi nasional dengan menyediakan basis data ilmiah, masukan berbasis kajian empiris, serta penerapan best practice dari berbagai inisiatif lapangan yang telah diimplementasikan (Chi, 2024). Inisiatif utama WWF meliputi program edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif plastik terhadap lingkungan, terutama pada ekosistem laut dan kawasan pesisir. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan kelompok masyarakat dilakukan untuk mempromosikan pemahaman tentang prinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang plastik (Nguyen et al., 2022).

NGO lainnya yaitu, *GreenHub* Vietnam, merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memainkan peran signifikan dalam upaya mitigasi limbah plastik di Vietnam melalui serangkaian inisiatif berbasis komunitas serta sinergi dengan berbagai pihak terkait. *GreenHub* Vietnam meluncurkan Program Inisiatif Komunitas sebagai upaya sistematis untuk meminimalkan konsumsi

plastik sekali pakai, dengan tujuan menjadikan kota Hôì An sebagai kawasan wisata berkelanjutan. Inisiatif ini dirancang untuk mentransformasi Hôì An menjadi destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan melalui kolaborasi multipihak, mencakup otoritas daerah, pelaku bisnis, kelompok masyarakat, dan pengunjung (Green Hub, 2022).

Aktor Lembaga Keuangan

Untuk aktor lembaga keuangan di Indonesia, penelitian ini membahas peran dari Bank DBS dan PT Bank HSBC Indonesia. Bank DBS Indonesia telah mendemonstrasikan komitmennya terhadap upaya penanggulangan limbah plastik di Indonesia melalui serangkaian inisiatif strategis, salah satunya pendanaan dan instrumen keuangan berkelanjutan bagi proyek-proyek daur ulang plastik serta pengurangan konsumsi material plastik, sekaligus mempromosikan kesadaran publik mengenai signifikansi pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Bank DBS Indonesia telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis dalam rangka menekan volume limbah plastik, selaras dengan komitmen internasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan. Salah satu bentuk realisasi inisiatif ini adalah dengan meminimalisir pemakaian material plastik sekali pakai di seluruh lini operasional perbankan, termasuk di kantor cabang dan unit pendukung lainnya (DBS Foundation, 2024).

Sementara itu PT Bank HSBC Indonesia, telah berperan aktif dalam upaya pengurangan sampah plastik di Indonesia contohnya, bank HSBC turut serta dalam mendanai dan mempromosikan proyek-proyek yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta meningkatkan sistem daur ulang. Bank DBS Indonesia turut berkolaborasi dalam *National Plastic Action Partnership* (NPAP) Indonesia. Salah satu bentuk realisasi inisiatif ini adalah dengan meminimalisir pemakaian material plastik sekali pakai di seluruh lini operasional perbankan, termasuk di kantor cabang dan unit pendukung lainnya. Selain itu, institusi ini juga gencar melakukan edukasi kepada nasabah dan masyarakat luas mengenai urgensi pengurangan sampah plastik melalui berbagai program kampanye dan penyuluhan (DBS Foundation, 2024).

Pada sisi lain, aktor lembaga keuangan di Vietnam yang diulas dalam penelitian ini adalah *World Bank* dan *Asian Development Bank* (ADB) Vietnam. *World Bank Vietnam* meluncurkan program “*Vietnam Country Plastic Pollution Diagnostics* (2021)”, yang merupakan sebuah analisis mendalam untuk mengevaluasi dampak lingkungan, sumber polusi, serta tantangan sistemik dalam penanganan sampah plastik di Vietnam. Laporan ini mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang masif telah mendorong peningkatan produksi dan konsumsi plastik, sementara kapasitas pengelolaan limbah belum memadai untuk menangani volume sampah plastik yang terus bertambah (World Bank, 2022).

Sementara itu, *Asian Development Bank* (ADB) Vietnam telah berperan penting dalam mendukung upaya Vietnam mengurangi polusi sampah plastik melalui bantuan teknis dan pendanaan untuk memperkuat kerangka kebijakan dan infrastruktur pengelolaan sampah plastik di Vietnam. Salah satu program yang diluncurkan oleh *Asian Development Bank* (ADB) di Vietnam adalah “*Promoting Action on Plastic Pollution from Source to Sea in Asia and the Pacific*”. Program ini berfokus pada penanganan sampah plastik di Vietnam dengan memajukan praktik pengelolaan limbah berkelanjutan, memperkuat kerangka kebijakan nasional, serta mendorong partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat (Asian Development Bank, 2019).

Dari analisis terhadap berbagai aktor yang terlibat dalam penanganan sampah plastik di Indonesia dan Vietnam, terlihat bahwa kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya mengurangi polusi plastik. Di tingkat pemerintah, Indonesia mengandalkan koordinasi multi-kementerian dengan KLHK sebagai *leading sector* dan Kemenko Marves sebagai pengarah kebijakan maritim. Pendekatan ini menekankan prinsip ekonomi sirkular melalui skema *Extended Producer Responsibility* (EPR), yang mewajibkan produsen terlibat dalam pengelolaan sampah plastik. Namun, tantangan utama terletak pada konsistensi implementasi di lapangan dan sinkronisasi antarlembaga. Sementara itu, Vietnam melalui MONRE lebih fokus pada pembatasan plastik sekali pakai secara langsung, didukung oleh MARD. Vietnam juga lebih agresif dalam menerapkan aturan ketat terhadap plastik sekali pakai, dengan dukungan kuat dari UNDP dan lembaga internasional lainnya.

Pada sektor swasta, perusahaan multinasional seperti Unilever dan Nestle di Indonesia aktif dalam program daur ulang dan kemasan berkelanjutan, dengan inisiatif seperti "Bijak Berplastik" dan kerja sama dengan bank sampah. Di Vietnam, Coca-Cola lebih menekankan inovasi material alternatif serta kampanye edukasi konsumen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa industri di Vietnam cenderung lebih proaktif dalam mencari solusi berbasis teknologi, sementara di Indonesia fokusnya lebih pada penguatan sistem daur ulang yang melibatkan masyarakat lokal.

Lembaga Swadaya Masyarakat (Aktor NGO) di kedua negara juga memiliki karakteristik unik. Di Indonesia, organisasi seperti WWF dan *Greenpeace* lebih banyak terlibat dalam advokasi kebijakan dan tekanan terhadap korporasi, sementara di Vietnam, WWF dan *GreenHub* lebih berfokus pada pendekatan berbasis data dan pemberdayaan komunitas. LSM Vietnam juga lebih intensif dalam kerja sama dengan lembaga internasional untuk memperkuat kapasitas lokal.

Dalam Aktor Keuangan, Indonesia mengandalkan peran bank domestik seperti Bank DBS dan HSBC yang mendanai proyek daur ulang dan ekonomi sirkular. Sementara itu di Vietnam lebih banyak memanfaatkan pendanaan dari lembaga keuangan global seperti *World Bank* dan ADB untuk membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih modern.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia dan Vietnam sama-sama berkomitmen mengurangi sampah plastik, strategi yang digunakan mencerminkan perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan. Indonesia lebih mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, sementara Vietnam cenderung lebih tegas dalam regulasi dan lebih banyak mengadopsi solusi berbasis teknologi. Kedua negara dapat saling belajar, terutama dalam hal memperkuat implementasi kebijakan dan inovasi daur ulang.

Perbandingan Tantangan

Perbandingan tantangan di sini mengacu pada analisis kritis terhadap berbagai kendala struktural, teknis, sosial, dan politik yang muncul dalam pelaksanaan inisiatif (NPAP) baik di Indonesia maupun di Vietnam. Tujuannya bukan hanya untuk melihat kesulitan yang dihadapi masing-masing negara, melainkan juga untuk memahami bagaimana konteks nasional memengaruhi efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan lingkungan global, khususnya sampah plastik. NPAP, baik Indonesia maupun Vietnam menghadapi kompleksitas dalam menyelaraskan tujuan nasional dengan komitmen global terhadap pengurangan sampah plastik, di mana tantangan-tantangan ini mencerminkan kondisi internal negara masing-masing. Berbagai macam tantangan yang di hadapi seperti tantangan *good governance*, tantangan kebijakan dan program, tantangan pendanaan, dan tantangan dukungan publik seperti rendahnya kesadaran masyarakat.

Tantangan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan)

Good governance pada hakikatnya merupakan sebuah ide yang merujuk pada proses pengambilan keputusan beserta implementasinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang lebih efektif dalam mencegah praktik korupsi, baik di ranah politik maupun administratif (Maulida, 2018). Dalam konteks tata kelola pengurangan sampah plastik di Indonesia dan Vietnam menghadapi tantangan yang mirip, meskipun diterapkan dalam sistem kelembagaan yang berbeda.

Di Indonesia, pendekatan *multi-level governance* yang dirancang untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah masih mengalami kendala koordinasi yang cukup serius (Alfajri et al., 2025). Dalam konteks pengurangan sampah plastik, regulasi nasional seperti Permen LHK No. P.75 Tahun 2019 yang mengatur *roadmap* pengurangan sampah oleh produsen, telah menyediakan landasan hukum yang relatif komprehensif. Namun, implementasinya di tingkat praktik sering kali tidak seragam akibat kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketidakharmonisan ini berimplikasi pada variasi penerapan kebijakan *Extended Producer Responsibility* (EPR), di mana sejumlah perusahaan tidak memenuhi kewajiban pelaporan maupun penyusunan rencana pengurangan sampah sesuai ketentuan peraturan. Masalah koordinasi tidak hanya terjadi secara vertikal dalam pemerintahan, tetapi juga secara horizontal dalam kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan tumpang tindih dalam pengelolaan sampah (Kinasih, 2024).

Sementara itu, Vietnam juga menginisiasi berbagai kebijakan strategis untuk mengatasi polusi plastik laut, salah satunya melalui *National Action Plan for Management of Marine Plastic Litter by 2030*, yang bertujuan mengurangi secara signifikan limbah plastik yang masuk ke ekosistem kelautan. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan struktural, terutama karena sentralisasi birokrasi yang kurang responsif terhadap dinamika lokal. Studi menunjukkan bahwa pemerintah daerah, khususnya di kawasan pesisir dan pedesaan. Kawasan tersebut sering terkendala oleh keterbatasan kapasitas teknis dan anggaran, sehingga menghambat transformasi kebijakan nasional menjadi program operasional yang berkelanjutan (Thi et al., 2021).

Tantangan Kebijakan dan Program

Implementasi kebijakan dan program pengurangan sampah plastik di Indonesia dan Vietnam menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis yang kompleks, meskipun kedua negara telah menetapkan target yang ambisius dalam memerangi polusi plastik melalui kolaborasi multistakeholder. Di Indonesia, masalah utama berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pengelolaan limbah, khususnya di daerah terpencil dan kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi. Walaupun regulasi *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.75/2019 telah diterapkan untuk mendorong tanggung jawab produsen terhadap limbah mereka, implementasinya belum berjalan secara konsisten. Selain itu, kapasitas daur ulang domestik masih terbatas, investasi dalam fasilitas pengolahan sampah belum memadai, dan adopsi teknologi pengelolaan limbah plastik yang efisien masih rendah. Banyak daerah di Indonesia belum memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memenuhi standar lingkungan, sehingga sebagian besar sampah plastik terbuang secara sembarangan atau mencemari perairan (WWF Indonesia, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

Alfajri, O'Reilly, P., Varkkey, H., & Adura, T. A. (2025). Multilevel Peatland Governance: Exploring the Policy Impact among Local Actors in Shaping Peatland Policy Intervention in Indonesia.

- Article, 9(1), 186–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.24259/fs.v9i1.36612>
- Asian Development Bank. (2019). *Promoting Action on Plastic Pollution from Source to Sea in Asia and the Pacific*. December. <https://www.adb.org/projects/53068-001/main>
- Aziz, S. (2015). Pendidikan keluarga : konsep dan startegi. *Pendidikan Keluarga : Konsep Dan Strategi*, 235.
- Bäckstrand, K. (2008). Accountability of Networked Climate Governance: The Rise of Transnational Climate Partnerships. *Global Environmental Politics*, 8(3), 74–102. <https://doi.org/10.1162/glep.2008.8.3.74>
- BRIN. (2024). 11,3 Juta Ton Sampah di Indonesia Tidak Terkelola dengan Baik. BRIN. <https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-juta-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik>
- Brouwer, H., Hemmati, M., & Woodhil, J. (2019). *Tujuh prinsip untuk kemitraan multi-pemangku kepentingan yang efektif dan sehat*. Ecpdm Great Insights. <https://ecdpm.org/work/civil-society-business-pulling-in-the-same-direction-volume-8-issue-1-winter-2018-2019/seven-principles-for-effective-and-healthy-multi-stakeholder-partnerships>
- Chi, Q. (2024). *WWF-Vietnam commits to cutting plastic waste to transform Hue city into a green metropolis*. Nong Nghiep Moi Truong. <https://vietnamagriculture.nongnghiep.vn/wwf-vietnam-commits-to-cutting-plastic-waste-to-transform-hue-city-into-a-green-metropolis-d409074.html#:~:text=WWF-Vietnam's initiative to connect,into the environment by 2024.>
- Company, I. (2021). *Decision 1316/QĐ-TTg on strengthening management of plastic wastes in Vietnam*. *LuatVietnam*. <https://english.luatvietnam.vn/decision-no-1316-qd-ttg-approving-the-scheme-for-strengthening-management-of-plastic-wastes-in-vietnam-206004-doc1.html?utm>
- DBS Foundation. (2024). *DBS SUSTAINABILITY REPORT 2024*.
- DKSH Group. (2023). *Memperkaya Kehidupan Masyarakat dengan Mendaur Ulang Sampah Plastik di Vietnam*. DKSH Group. <https://www.dksh.com/global-en/insights/enriching-peoples-lives-by-recycling-plastic-waste-in-vietnam>
- Fithriyah, N. H. (2023). *Kenapa Sampah Plastik Sulit Diurai?* Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini-1/kenapa-sampah-plastik-sulit-diurai/>
- Green Hub. (2022). *Annual Report*. <https://cdn4049.cdn4s7.io.vn/media/annual-reports/greenhub-ar-2022-resize-final.pdf>
- Green Peace. (2021). *Bumi Tanpa Plastik*. 01-06-2025
- Green Peace Indonesia. (2023). *Pawai Bebas Plastik*. <https://dietkantongplastik.info/pawai-bebas-plastik-2/>
- Grillo, R. (1998). *PLURALISM AND THE POLITICS OF DIFFERENCE*. Clarendon Press. https://books.google.co.id/books?id=NwlREAAQBAJ&dq=Kauppi,+Mark+V.+1996.+Plural+ism+and+the+Politics+of+Difference:+State,+Culture,+and+Ethnicity+in+Comparative+Perspective.+Oxford+University+Press.&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s
- Hendar, H., Rezasyah, T., & Sari, D. S. (2022). Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui ASEAN dalam Menanggulangi Marine Plastic Debris. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 201. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.40721>
- Hubbeman, & Milles. (2024). *Bagaimana Langkah-Langkah Analisis Kualitatif Menurut Miles dan Huberman?* Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul “Bagaimana Langkah-Langkah Analisis Kualitatif Menurut Miles dan Huberman?”, Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/hen12>. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/hen12684/65cb3df7c57afb69cf72ee02/bagaimana-langkah->

- langkah-analisis-kualitatif-menurut-miles-dan-huberman
Institute for Global Environmental Strategies. (2024). *Action and Progress on Marine Plastic Litter*. Osaka Blue Ocean Vision. <https://g20mpl.org/partners/vietnam>
- IWRM. (2025). *Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan*. Global Water Partnership. <https://iwrmactionhub.org/learn/iwrms-tools/multi-stakeholder-partnerships>
- Karuniastuti, N. (2013). Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan. *Swara Patra: Majalah Pusdiklat Migas*, 3(1), 6-14. <http://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/43/65>
- Kemenko PMK. (2023). *7,2 Juta Ton Sampah di Indonesia Belum Terkelola Dengan Baik*. Kemenko PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen*. Lembaran Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/312182>
- Keohane, R. J., & Joseph Nye. (1988). Power and Interdependence. In *Grupo Editor Latinoamericano*.
- Kinasih, A. (2024). A NEW COLLABORATION TO MANAGE PLASTIC WASTE IN JAKARTA, BOGOR AND DEPOK CITIES. WWF. <https://www.wwf.id/en/blog/new-collaboration-manage-plastic-waste-jakarta-bogor-and-depok-cities>
- KLHK. (2019). *Gerakan Indonesia Bersih Diluncurkan*. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. <https://itjen.menlhk.go.id/berita/gerakan-indonesia-bersih-diluncurkan>
- Maulida, W. (2018). *Hambatan dalam Mewujudkan Good Governance*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/widiyamaulida/5c08b8c1bde5751702421776/hambatan-dalam-mewujudkan-good-governance>
- Ministry of Agriculture and Rural Development. (2020). *National Action Plan for Management of Marine Plastic Litter By 2030*. https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/environment_climate/national-action-plan-for-management-of-marine-plastic-litter-by-.html
- Munib, A., & Wulandari, F. (2021). Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(1), 160-172. <https://doi.org/10.29407/jpdn.v7i1.16154>
- Nguyen, T. T., Pham, M. H., Kim, T. T. N., Dinh, Q. H., Nguyen, T. T. D., Dang, T. P. H., & Tran, T. N. M. (2022). *Current Situation and Solutions to Promote Plastic Waste Recycling in Vietnam*. https://wwfasia.awsassets.panda.org/downloads/taiche_nhua_eng_final_trangdoi_1_1_1.pdf
- OECD. (2022). *OECD: 2060 Sampah Plastik Naik Tiga Kali Lipat, Pengenaan Cukai Harus Diperluas*. MUC Conculting. <https://muc.co.id/id/article/oecd-2060-sampah-plastik-naik-tiga-kali-lipat-pengenaan-cukai-harus-diperluas>
- Okumah, M. (2024). *Riak Perubahan: Perjalanan Vietnam Mengurangi Polusi Plastik*. UNDP. <https://www.undp.org/vietnam/stories/ripples-change-viet-nams-journey-reduce-plastic-pollution>
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2019). *Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/3851/peraturan-gubernur-nomor-142-tahun-2019-tentang-kewajiban-penggunaan-kantong-belanja-ramah-lingkungan-pada-pusat-perbelanjaan->

- toko-swalayan-dan-pasar-rakyat
- Powell, G. B., Dalton, R. J., & Strom, K. W. (2017). *Comparative Politics Today A World View*. A World View. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781292076966_A24336507/preview-9781292076966_A24336507.pdf
- PT Nestle Indonesia. (2024). *Luncurkan Program Distribusi 5.000 Bangku Daur Ulang ke 500 Sekolah Dasar*. Nestle.Co.Ic. <https://www.nestle.co.id/media/pressreleases/allpressreleases/bangku-daur-ulang>
- Putrantomo, F., Syafei, A., Setiawan, A., Gusthi, A. S., Adryansyah, A., Suryana, A., Aina, F., & Mahira, Z. (n.d.). *DIREKTORAT PENGURANGAN SAMPAH*.
- Putri, A. S., Isfa, E., Rachmawati, A., & Shakira, A. A. (2024). *THE INDONESIA-AUSTRALIA COLLABORATION TO TACKLE PLASTIC WASTE THROUGH THE INDO-PACIFIC PLASTIC INNOVATION NETWORK (IPPIN) PROGRAM*. 302–316.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=MGOs5rkAAAAJ&citation_for_view=MGOs5rkAAAAJ:a9-T7VOCCH8C
- Thi, G. P., Tung, T. N., Herat, S., & Tung Nguyen Thanh. (2021). Management of Marine Plastic Waste Generated from Land-based Sources in Viet Nam: Problems, Constraints, and Solutions. *International Journal of Environmental Science & Sustainable Development*. <https://doi.org/10.21625/essd.v6i1.792>
- Triana, Sembiring, A. P., & Emenda. (2019). Performance Evaluation and Sustainability of Waste Bank Program As One of the Approaches in Waste Management With 3R Concept. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 25(1), 15–28.
- UNDP. (2023). *National Plastic Action Partnership discusses how to reduce plastic waste in Viet Nam*. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/vietnam/press-releases/national-plastic-action-partnership-discusses-how-reduce-plastic-waste-viet-nam>
- Unilever. (2023). *90 Tahun Dedikasi Tumbuh Bersama Negeri Laporan Tahunan 2023*. <https://www.unilever.co.id/investor/>
- USDN. (2016). *Multi-Stake Cooperative*. USDN. <https://sustainableconsumption.usdn.org/initiatives-list/multi-stakeholder-cooperatives>
- Utomo, P. (2023). *Indonesia Masuk Sepuluh Besar Negara Pengimpor Sampah Plastik Global*. National Geographic Indonesia. <https://nationalgeographic.grid.id/read/133734756/indonesia-masuk-sepuluh-besar-negara-pengimpor-sampah-plastik-global?page=all>
- Vietnam News. (2021). *Kisah plastik: Solusi dan upaya Unilever Vietnam menuju pembangunan berkelanjutan*. Vietnam News. <https://vietnamnews.vn/brand-info/978117/the-story-of-plastic-solutions-and-efforts-of-unilever-vietnam-towards-sustainable-development.html#:~:text=Focus-,The story of plastic: Solutions and efforts of Unilever Vietnam,increasing at a dizzying rate.>
- Vietnam News. (2023). *Việt Nam accelerating efforts to mitigate plastic pollution through NPAP operation*. Viet Nam News. <https://vietnamnews.vn/environment/1638142/viet-nam-accelerating-efforts-to-mitigate-plastic-pollution-through-npap-operation.html>
- Waste aid. (2025). *Vietnam -Bantuan Sampah*. Waste Aid. <https://wasteaid.org/programmes/vietnam/>
- World Bank. (2022). *Vietnam: Diagnostik Polusi Plastik*. World Bank. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099731406282241639/p1673071d02f2c0be180741356b6b0e3deb>
- World Bank Group. (2022). *Peta Jalan untuk Menghentikan Polusi Plastik Sekali Pakai di Vietnam*. Press

- Release. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/07/25/a-roadmap-to-stop-single-use-plastic-pollution-in-vietnam>
- Wulandari, Y. (2025). *Paradigma Pluralisme dalam Hubungan Internasional* Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Paradigma Pluralisme dalam Hubungan Internasional", Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/yunikawulandari/5e6b9ee8097f3637d11b26c6/paradigma-pl>. Kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/yunikawulandari/5e6b9ee8097f3637d11b26c6/paradigma-pluralism-dalam-hubungan-internasional>
- WWF Indonesia. (2025). *REKOMENDASI KEBIJAKAN KONTEN DAUR ULANG DI INDONESIA*. https://plasticsmartcities.wwf.id/storage/user_uploads/9bbb1a4f398155875a796ffab629b1ff.pdf
- Yi, L. (2023). Research on China Academic Social Sciences and Humanities Library (Third Edition). *Voice of the Publisher*, 09(02), 21–27. <https://doi.org/10.4236/vp.2023.92003>
- Zahran, R. Z., & Alfajri. (2023). Strategi Non-Governmental Organization (NGO) Jikalauhari dalam Tata Kelola Hutan Provinsi Riau Terkait Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Global Tahun 2013-2023. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 24–36. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/ejdis,+3.+Zaki.pdf>